



LAPORAN KINERJA 2022

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BPPHH TAHUN 2022

Disusun dan diterbitkan oleh
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
©2022

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan kreativitasnya demi mempercantik tampilan dan tata letak baik berupa Foto, infografis maupun gambar vektor sehingga dokumen LKJ ini memberikan kesan yang mendalam bagi para pembacanya.

Dokumen digital Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:

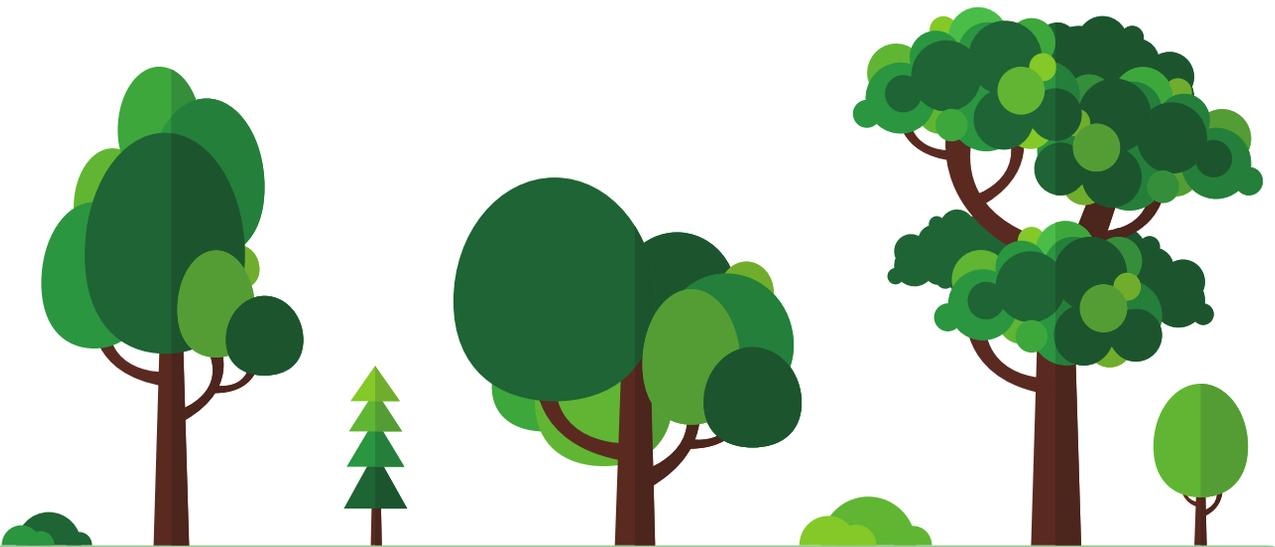


<https://bit.ly/LKJ2022-BPPHH>



KATA PENGANTAR

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat pelaksanaan peraturan perundangan tentang pelaporan keuangan dan sistem akuntabilitas kinerja.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan IKK, dapat tercapai dengan baik dan terdapat capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Pagu anggaran akhir kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022 sebesar Rp 15.828.316.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.611.015.044 (98,63%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,34%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,91.

Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2022 termasuk kategori efisien.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang telah bekerja keras dalam pencapaian kinerja tersebut, serta semua pihak yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan selama tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 11 Januari 2023
Direktur BPPHH,



Krisdianto, S.Hut., M.Sc., PhD
NIP. 19731001 199803 1 002

RINGKASAN

Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020 sampai 2024.

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

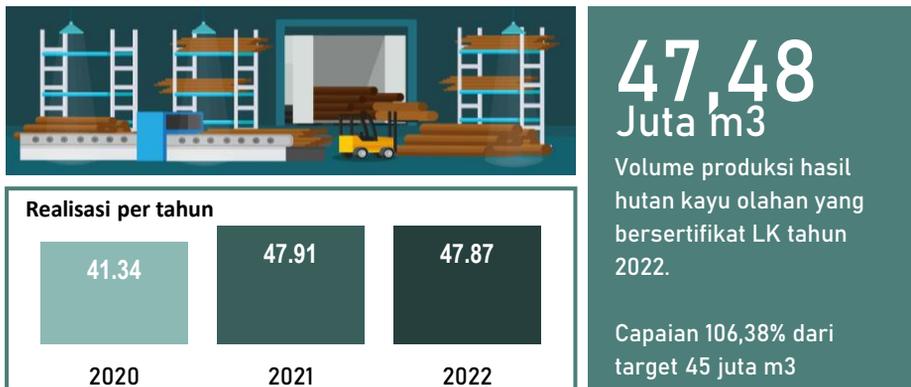
Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat Legalitas Kayu, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan telah menetapkan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: (1) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 45 juta m³ dengan capaian Tahun 2022 sebesar 47,56 juta m³; (2) UMKM yang difasilitasi SVLK (sertifikat/penilikan /inventarisasi) sebanyak 150 UMKM dengan capaian tahun 2022 sebanyak 194 UMKM; dan (3) Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 16 juta ton dengan capaian sebanyak 15,78 Juta Ton.

Dalam pencapaian IKK tersebut Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yaitu kepastian ketersediaan bahan baku untuk pengolahan hasil hutan, dinamisnya permintaan pasar ekspor kayu olahan, serta lemahnya pemahaman dan manfaat SVLK di tingkat UMKM.

Adapun strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan untuk menjawab persoalan dan tantangan antara lain :

1. Peningkatan pemantauan pelaporan pemenuhan baku dan realisasi produksi, serta melakukan evaluasi kinerja PBPHH;
2. Meningkatkan koordinasi multi stakeholder (sektor hulu-hilir dan pasar);
3. Mendorong relaksasi regulasi untuk penambahan luas penampang, koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyelesaian masalah ekspor, sosialisasi bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, serta melakukan promosi dan kerjasama perdagangan produk kayu legal ditingkat Internasional.
4. Bekerjasama dengan stakeholder melakukan sosialisasi SVLK ditingkat tapak, fasilitasi SVLK bagi UMKM dan promosi/perluasan akses pasar produk ber-SLK.

Meningkatnya Produktivitas Pengolahan Hasil Hutan



Meningkatnya Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan Bersertifikat Lk



DAFTAR ISI

Kata Pengantari
Ringkasan Eksekutifiii
Daftar isiv

01

BAB I PENDAHULUAN



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi03
Sumber Daya Manusia05

02

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-202411
Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Kontrak Kerja12
Perjanjian Kinerja13
Perhitungan Kinerja14



03

BAB III AKUNTABILITAS KINERA

Capaian Kinerja	17
Realisasi Anggaran	33
Perhitungan Efisiensi	35
Capaian Kegiatan Lainnya	37



04

BAB IV PENUTUP



Penutup	43
---------	----

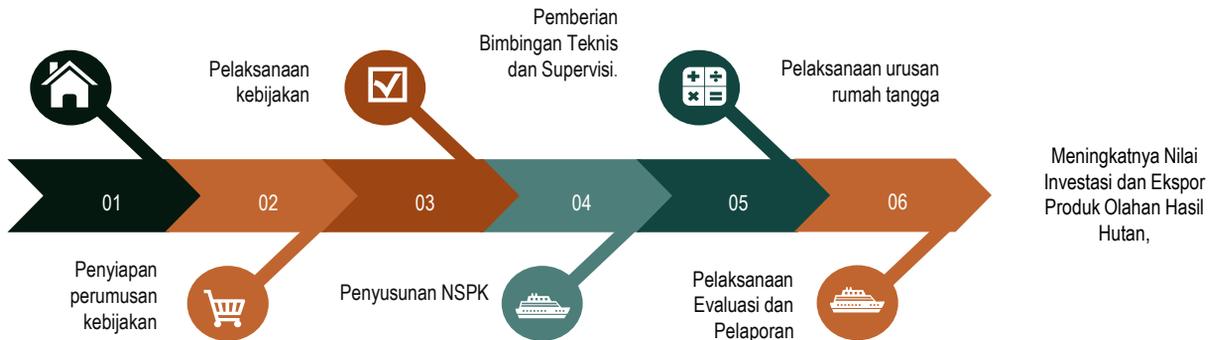


BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Struktur, Tugas Dan Fungsi Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Sistematika penyajian



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

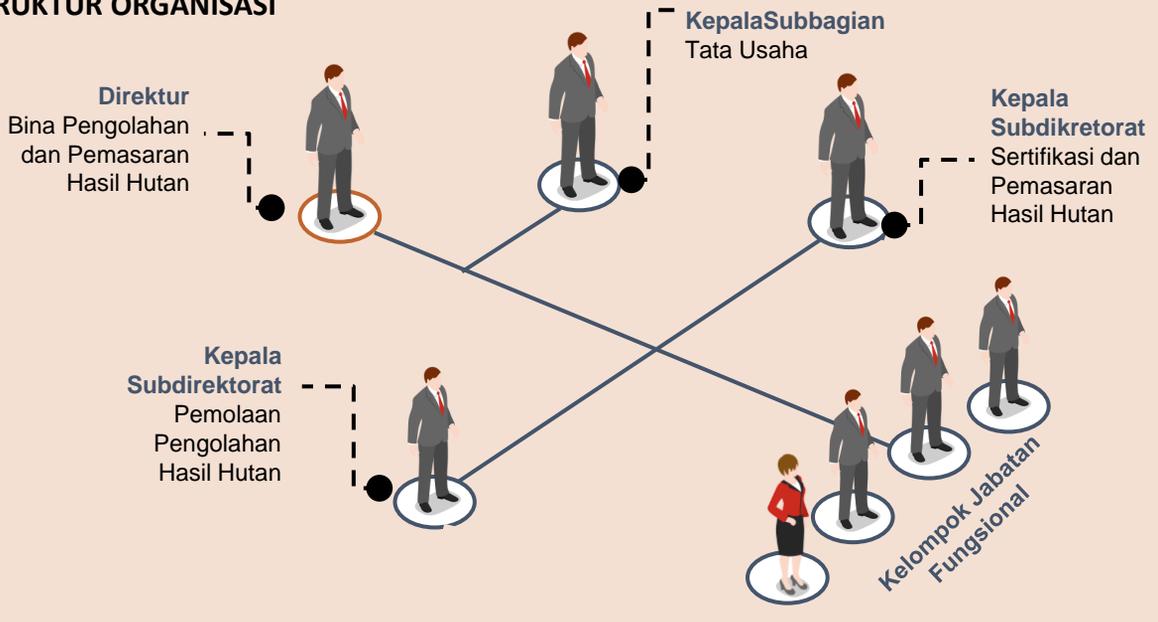


Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Direktorat BPPHH) merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan lestari.

Direktorat BPPHH memiliki tugas **Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengolahan dan pemasaran hasil hutan.** Sedangkan fungsi Direktorat BPPHH adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku
3. pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;

STRUKTUR ORGANISASI



6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas : (i) Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; (ii) Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan; Sub bagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan pengolahan hasil hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan dan kemitraan.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang sertifikasi, pemasaran dan kerjasama pemasaran produk pengolahan hasil hutan serta notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan.

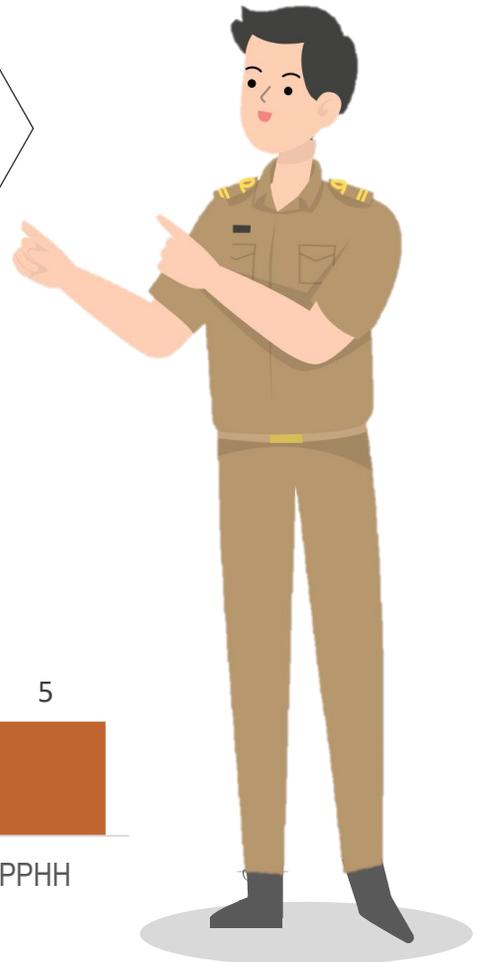
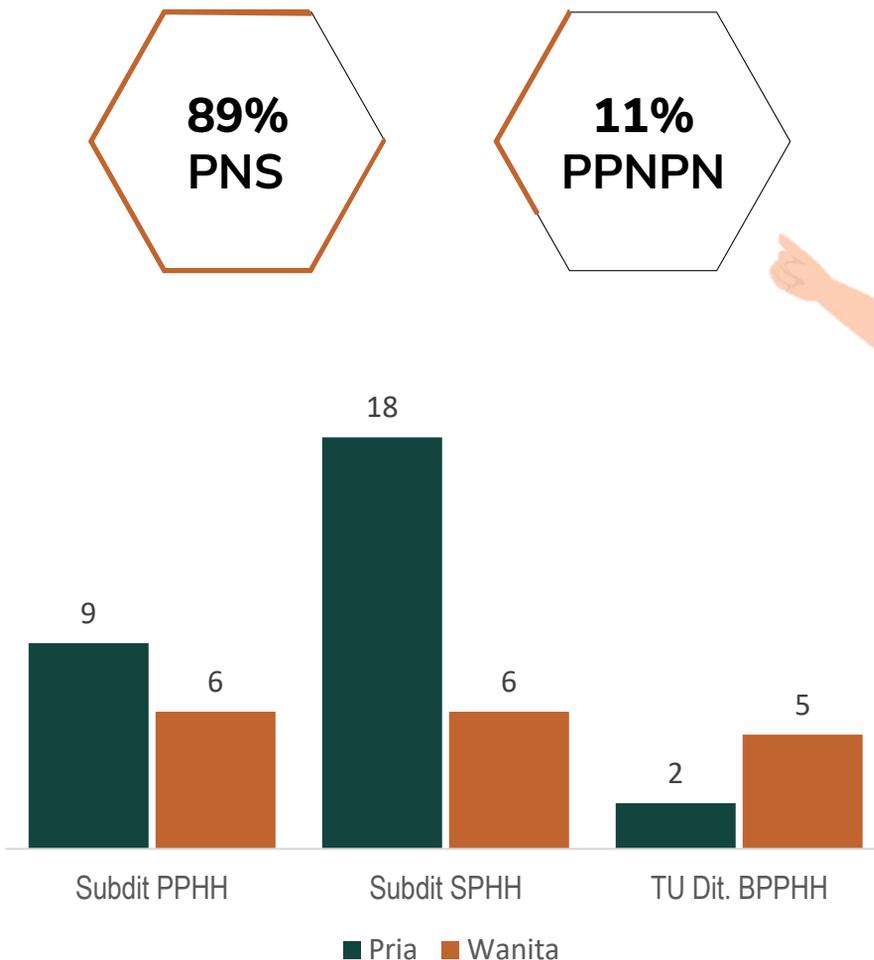
SUMBER DAYA MANUSIA

45

Total Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan memiliki jumlah sebanyak 45 Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. SDM tersebut terdiri dari 16 orang pegawai di satuan kerja (Satker) Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, 22 orang pegawai di satuan kerja (satker) Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan dan 8 orang pegawai di satuan kerja (satker) Tata Usaha Direktorat BPPHH.

SDM yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sejumlah 40 orang pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sejumlah 5 orang pegawai.





36% 

Jumlah pegawai Direktorat
BPPHH wanita sejumlah 17
orang

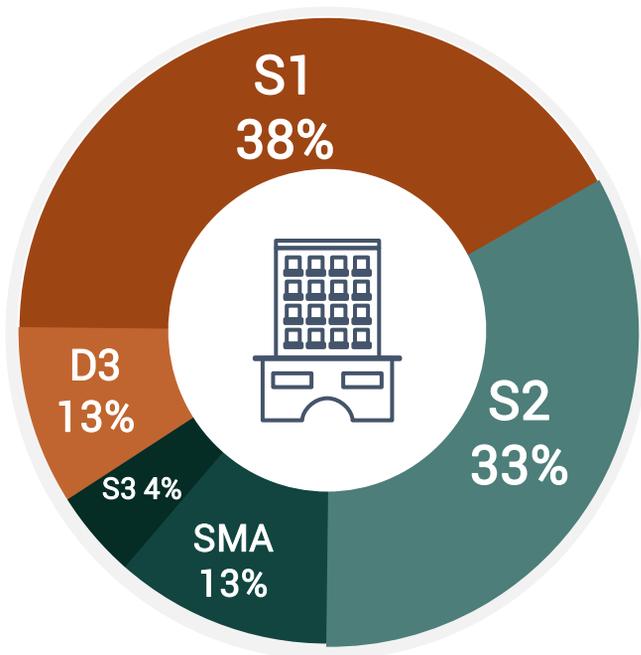
64% 

Jumlah pegawai Direktorat
BPPHH Pria sejumlah 30
orang



Angka diatas menunjukan hasil persentase klasifikasi pegawai Direktorat BPPHH bedasarkan jenis kelamin sebesar 64 % atau 30 orang mayoritas merupakan pegawai laki-laki disusul dengan pegawai wanita sebesar 36 % atau 17 orang dari total seluruh pegawai BPPHH sebanyak 47 orang.

SDM Dit. BPPHH siap Mendukung SDM Ditjen PHL Unggul dan BER-AKHLAK

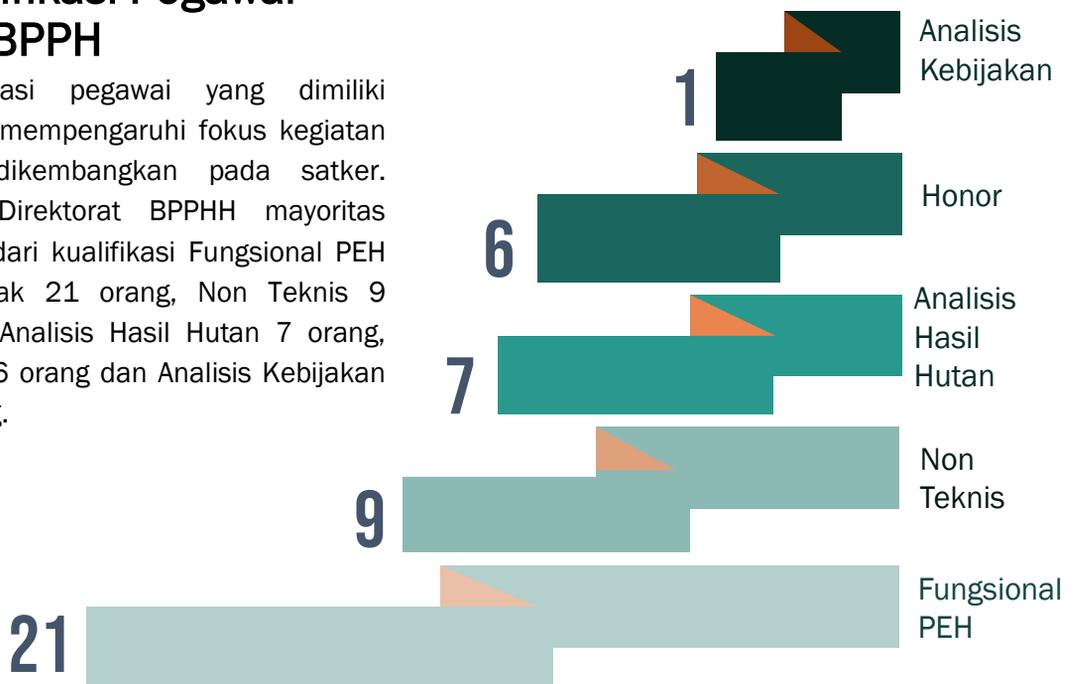


Tingkat Pendidikan Pegawai Dit. BPPH

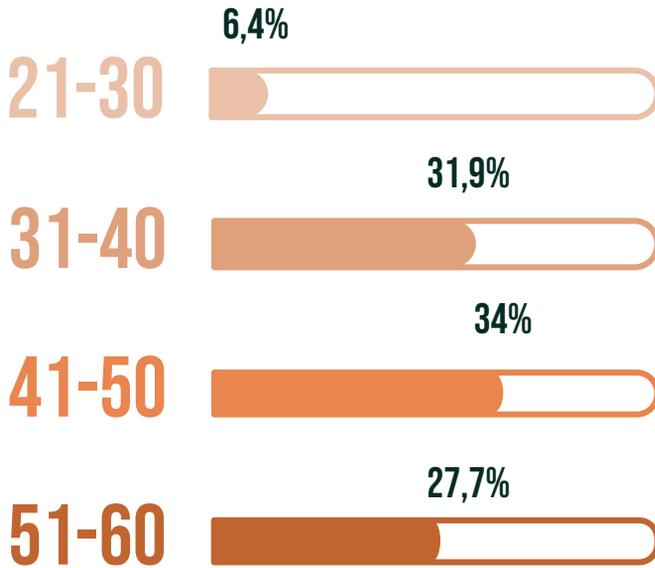
Kualitas SDM tidak lepas dari tingkat Pendidikan. Pada Direktorat BPPHH mayoritas memiliki Pendidikan S1 sebanyak 18 orang atau 38%, kemudian S2 sebanyak 15 orang atau 33%, D3 dan SMA sebanyak 6 orang atau 13 % dan S3 sebanyak 2 orang

Kualifikasi Pegawai Dit. BPPH

Kualifikasi pegawai yang dimiliki Satker mempengaruhi fokus kegiatan yang dikembangkan pada satker. Pada Direktorat BPPHH mayoritas terdiri dari kualifikasi Fungsional PEH sebanyak 21 orang, Non Teknis 9 orang, Analisis Hasil Hutan 7 orang, Honor 6 orang dan Analisis Kebijakan 1 orang.

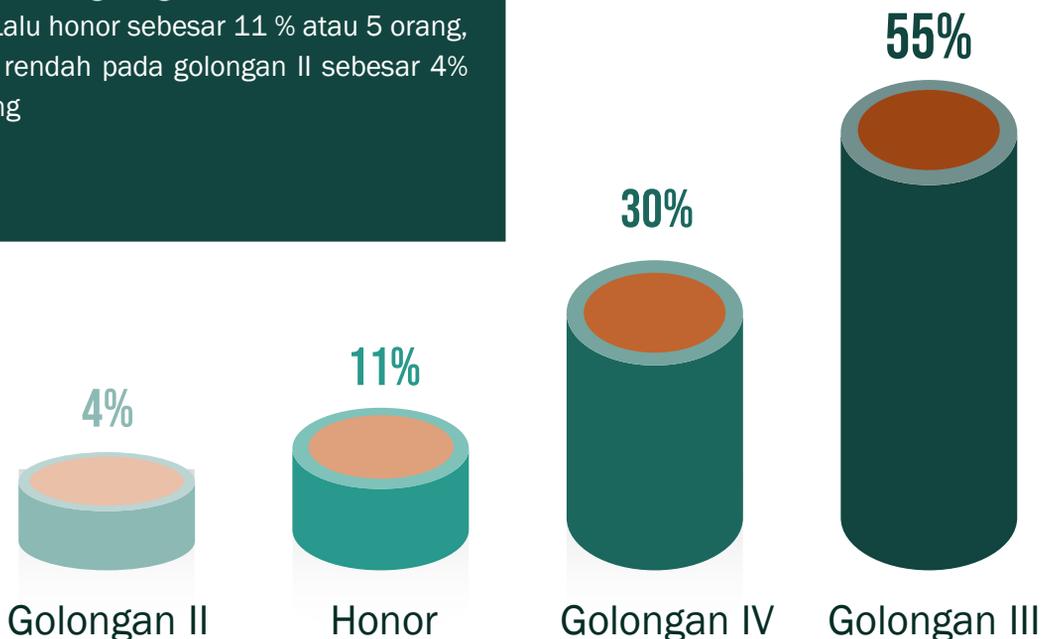


KELAS USIA PEGAWAI DAN GOLONGAN PEGAWAI DIT. BPPHH



Bedasarkan kelas usia menunjukan paling banyak pegawai di Dit. BPPHH berada di rentang umur 41-50 sebesar 34% atau 16 orang. Kemudian tidak jauh berbeda dengan rentang umur 31-40 sebesar 31,9% atau 15 orang. Lalu rentang umur 51-60 sebesar 27,7% atau 13 orang dan yang paling sedikit jumlah orang pada rentang umur 21-30 sebesar 6,1% atau 3 orang.

Bedasarkan Golongan tertinggi berasal dari golongan III sebesar 55% atau 26 orang, kemudian disusul golongan IV sebesar 30% atau 14 orang, Lalu honor sebesar 11 % atau 5 orang, dan paling rendah pada golongan II sebesar 4% atau 2 orang





BAB II PERENCANAAN KINERJA



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung Program “Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Sehingga, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab atas Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya Sasaran Program “Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan”.

Indikator kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yaitu IKP 4 “Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US\$10,5 miliar pada tahun 2024”

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Direktorat melalui Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, menurunkan menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi berikut :

IKK 1

Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (Juta M3)

2020	2021	2022	2023	2024
45	90	135	180	225

IKK 2

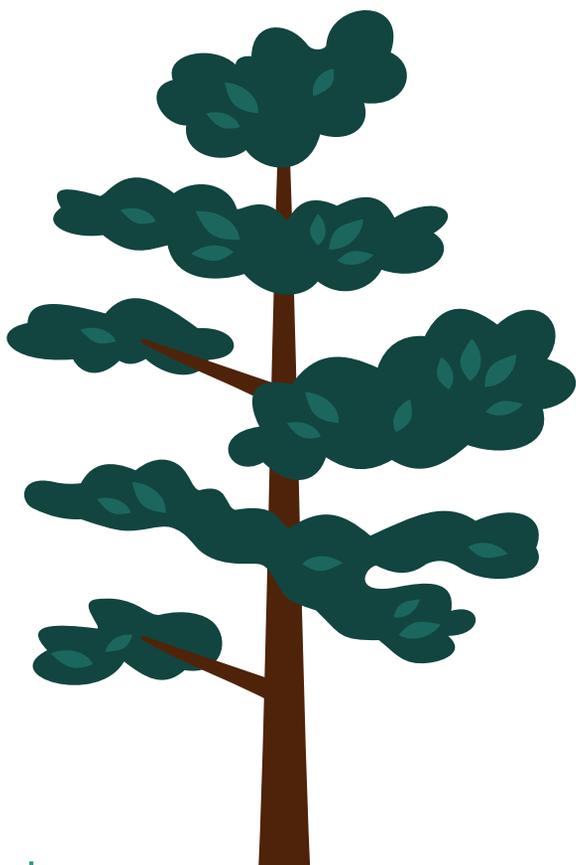
UMKM yang difasilitasi sertifikasi penilikan SVLK (UMKM)

2020	2021	2022	2023	2024
160	360	510	610	710

IKK 3

Ekspor Produksi Olahan Hasil Hutan

2020	2021	2022	2023	2024
15	30,5	46,5	63	80



RENCANA KERJA, RENCANA KERJA ANGGARAN DAN KONTRAK KERJA

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKK dengan target tertentu.

Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut



Dokumen Renja
Dit BPPHH Tahun 2022

bit.ly/Renja2022-BPPHH

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menargetkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2022 sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi diatas.



Dokumen
Perjanjian Kinerja
Dit BPPHH Tahun 2022

bit.ly/PK2022-BPPHH

TARGET 45 JUTA M3

Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu



TARGET 16 JUTA TON

Ekspor produk industri kehutanan

TARGET 150 UMKM

UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilaian SVLK



PERHITUNGAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Perbandingan realisasi dengan standar.

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 adalah **metoda perbandingan realisasi dengan target tahun 2021** dan **metode perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024**.



Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula **analisis efisiensi** dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Output}}$$

Sebagai catatan, apabila angka efisiensi kurang dari angka 1 berarti EFISIEN atau menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif untuk memenuhi sasaran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran
- C. Perhitungan Capaian Kinerja
- D. Kinerja Lainnya



A.

CAPAIAN KINERJA



PERBANDINGAN CAPAIAN IKK DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

IKK	2020		2021		2022		Periode 2020 - 2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
IKK 01. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (Juta m ³)	45	41,34 (91,87%)	90	89,25 (99,17%)	135	137,12 (101,57%)	225	137,12 (60,94%)
IKK 02. Ekspor produk olahan hasil hutan kayu (Juta Ton)	15	16,72 (111,47%)	35,5	33,75 (95,07%)	46,5	49,53 (106,52%)	80	49,53 (61,91%)
IKK 03. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (UMKM)	160	39 (24,38%)	360	339 (94,17%)	510	533 (104,51%)	710	533 (75,07%)

Menapaki tahun ke-3 pelaksanaan Renstra 2020-2024, Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) IKK sebagaimana ditampilkan pada table diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh rata-rata telah melebihi angka 50 persen.

Kinerja tersebut yang telah dicapai tersebut mendukung program pengelolaan hutan lestari melalui peningkatan produktivitas pengolahan hasil hutan dan peningkatan ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu.



01. VOLUME PRODUKSI KAYU OLAHAN YANG BERSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Peningkatan Kinerja pengolahan hasil hutan kayu merupakan salah satu upaya mendorong kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan dan investasi pengolahan hasil hutan. Hal ini didukung dengan peningkatan produktivitas pengolahan hasil hutan kayu untuk industri kayu gergajian, *plywood*, *veneer*, *pulp* dan serpih kayu yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu.

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu merupakan jumlah kayu olahan (dalam meter kubik) bersertifikat SVLK yang diproduksi oleh Industri Pengolahan Hasil Hutan pemilik Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBBPH).

Data capaian kinerja IKK 1 diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (SI-

RPBBPHH). Pada tahun 2022 realisasi volume produksi kayu olahan sebesar 47,87 juta m3, atau 106,38 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2022. Angka tersebut menurun meningkat 0,07% dibandingkan capaian produksi tahun 2021 sebesar 47,908 juta m3.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu sebesar 225 juta, maka capaian volume produksi kayu olahan secara kumulatif tahun 2020-2022 sebesar 137,12 juta m3 atau 60,94 % dari target.

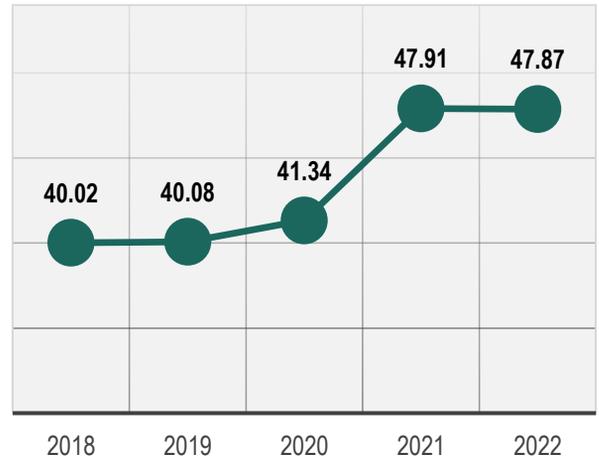
Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat dalam membina Industri pengolahan hasil hutan untuk terus berkinerja. Dengan terbitnya Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pasca UUCK, Direktorat juga turut mendukung percepatan perizinan berusaha untuk mendorong tumbuhnya industri baru.

Tren volume produksi kayu olahan bersertifikat Legalitas Kayu mengalami peningkatan selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, hal tersebut selaras dengan terbitnya UUCK yang mendukung kemudahan berusaha, salah satunya dalam mengajukan PBPHH.

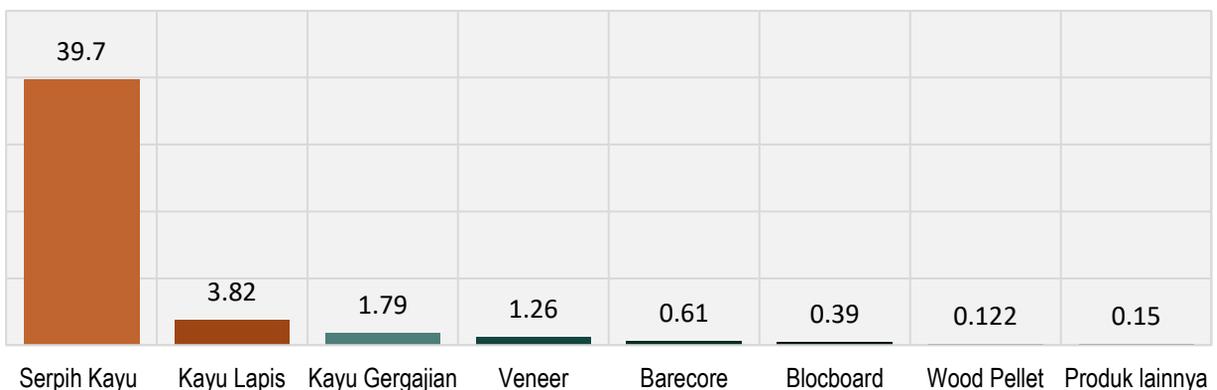
Volume produksi kayu olahan Tahun 2022 sampai dengan periode Desember 2022 adalah 47.874.622,48 m³ dengan rincian, sebagai berikut : kayu lapis 3.822.988,02 m³, veneer 1.260.754,90 m³, kayu gergajian 1.796.573 m³, serpih kayu (chips) 39.703.708,34 m³ dan atau ton, wood pellet 122.164,07 ton, blockboard 398.169,56 m³, barecore 614.600,31 m³ dan produk lain sebesar 155.663,45 m³ seperti pada gambar di bawah

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 produksi kayu olahan didominasi oleh ragam produk serpih kayu (chips).

Tren Volume Kayu Olahan Per Tahun (juta m3)



Volume Kayu Olahan Per Ragam Produk Tahun 2022 (juta m3)





Strategi yang dilakukan untuk mencapai IKK diantaranya adalah :

1. Mendorong PBPHH untuk melakukan perubahan komposisi ragam produk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar;
2. Kemudahan proses perubahan ragam produk pada perizinan pengolahan hasil hutan, yaitu dapat dilakukan lintas jenis industry tanpa menambah total kapasitas izin produksi;
3. Peningkatan pemantauan laporan realisasi produksi pengolahan hasil hutan;
4. Mendorong PBPHH yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan
5. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan kegiatan pengolahan hasil hutan dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari terkait dengan pengendalian PBPHH skala usaha kecil dan menengah.

Kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian IKK adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kinerja produksi Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
2. Melakukan bedah kinerja PBPHH yang kinerja produksinya rendah, guna menggali

permasalahan dan memberikan alternative solusi untuk peningkatan kinerjanya;

3. Melakukan upaya mendorong terbitnya SK Direktur Jenderal PHL tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya sebagai bagian dari evaluasi rendemen kayu olahan yang sesuai dengan kondisi saat ini
4. Memberikan toleransi 30% dari kapasitas produksi kepada PBPHH yang akan melampaui kapasitas produksinya; dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 13 PBPHH yang memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal PHL;
5. Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengolahan hasil hutan yang alokasi anggarannya ada di Balai.

Kendala dalam pencapaian IKK teridentifikasi antara lain :

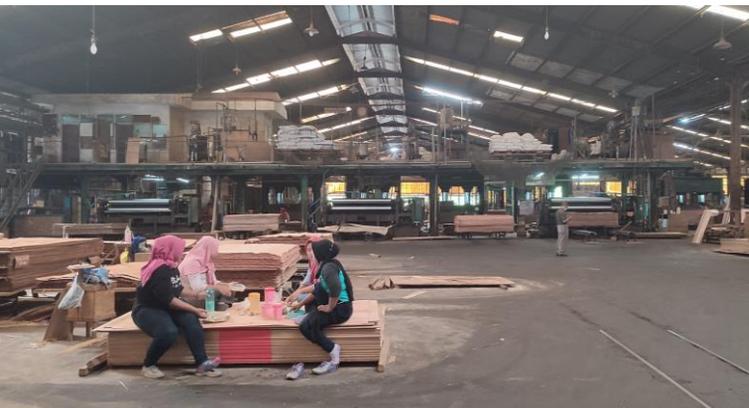
1. Pelaku usaha kesulitan memperoleh/ akses terhadap sumber bahan baku;
2. Dinamisnya permintaan pasar ekspor untuk produk kayu olahan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu, pelaksanaan indicator ini didukung oleh 4 (empat) Rincian Output (RO) dengan uraian target dan realisasi sebagaimana table 4

berikut. capaian kegiatan Rincian Output tersebut merupakan capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL).

Dukungan Rincian Output pada IKK 1

Kode Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persen (%)
6733.AFA.001	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Draf NSPK	1	1	100
6733.PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Rekomendasi	1	1	100
6733.QAH.001	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Besar	Layanan	37	42	113
6733.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Badan Usaha	150	153	102



IKK

02. EKSPOR PRODUKSI KAYU OLAHAN



Indikator Kinerja Kegiatan 2 ekspor produksi kayu olahan merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekspor produk kehutanan sebagai sumber devisa negara melalui kegiatan ekspor produk kehutanan. Target IKK ekspor produk kehutanan tahun 2022 adalah volume ekspor sebesar 16 Juta ton atau 0,5 Juta ton lebih tinggi dari target sebelumnya sebesar 15.5 Juta Ton.

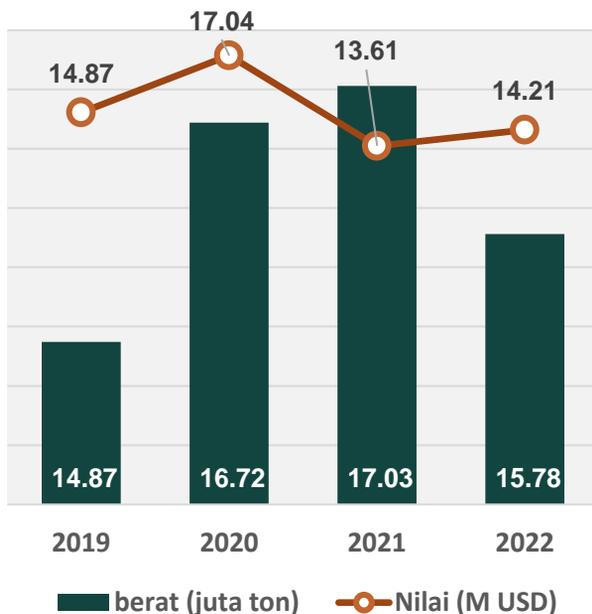
Volume ekspor produk kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang merupakan dokumen yang bersifat wajib untuk ekspor produk industri kehutanan. Adapun satuan yang digunakan yaitu kilogram yang dapat dikonversi menjadi satuan volume lainnya (ton). Satuan ini merupakan satuan yang wajib diisi di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Capaian kinerja IKK 2 ekspor produk kayu olahan pada tahun 2022 sebesar 15,78 juta ton atau 98,63% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian volume ekspor produk kayu olahan secara tonase mengalami penurunan sebesar 7,12% dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 16,99 juta ton . Namun secara nilai ekspor produk hasil hutan pada tahun 2022 (dalam USD) mengalami peningkatan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 80 juta ton, volume ekspor produk hasil hutan telah terealisasi sebesar 49,53 juta ton sepanjang 2020 sd. 2022 atau sebesar 61,91% dari target.



Tren Volume (Juta ton) dan Nilai (M USD) Ekspor Produk Kayu Olahan 20109-2022



Volume kayu ekspor kayu olahan mengalami penurunan pada tahun 2022, namun secara nilai mengalami peningkatan, sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi disamping.

Nilai ekspor produk kayu olahan cenderung mengalami peningkatan, sempat menurun akibat adanya pandemic pada tahun 2020, sektor kehutanan mampu bertahan dan bangkit melalui berbagai relaksasi kebijakan. Hasilnya, pada tahun 2022 mengalami mencapai nilai tertinggi selama 4 tahun terakhir.

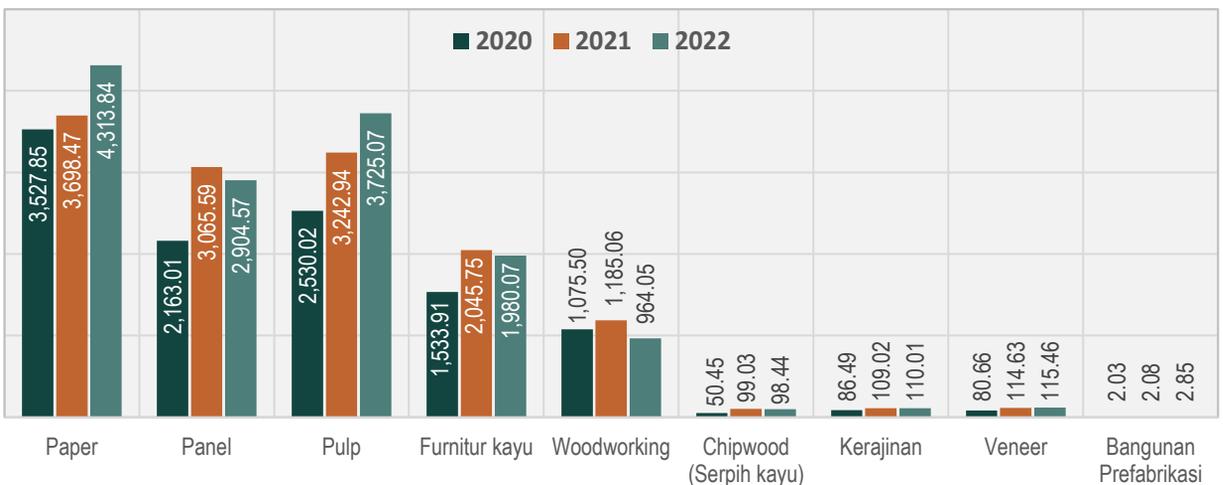
Tren Volume Ekspor Produk kehutanan per kelompok jenis produk dari 2020-2022 (x1.000Ton)



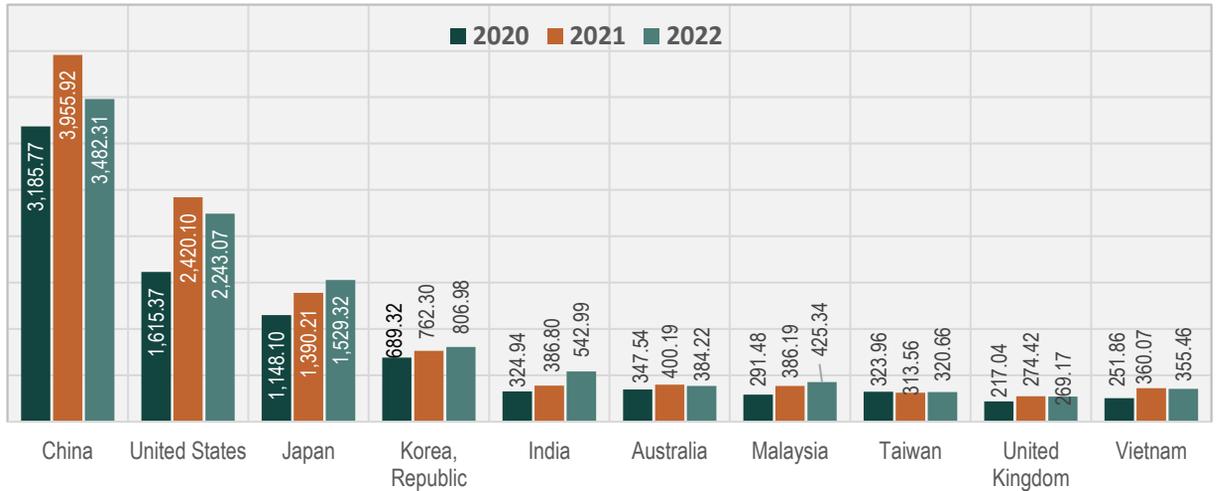
Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2020 – 2022, produk pulp memiliki volume ekspor tertinggi dibandingkan ragam produk lainnya. Tingginya volume ekspor pulp dibanding kertas juga menunjukkan bahwa pasar global lebih banyak membutuhkan bahan setengah jadi dalam bentuk pulp.

Sedangkan berdasarkan table dibawah, dari segi nilai, produk kertas memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan pulp dan juga ragam produk lainnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor kertas yang tertinggi selama 3 tahun berturut-turut.

Tren Nilai Ekspor Produk kehutanan per kelompok jenis produk dari 2020-2022 (x 1.000.000 USD)



Perkembangan Nilai Ekspor ke 10 Besar Negara Tujuan (M USD)



Pasar ekspor produk industri kehutanan masih didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia sebesar 65,64% dari nilai ekspornya dan 83,90% dari volume ekspornya.

Selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Negara tujuan ekspor yang tertinggi adalah negara Cina, Dimana hal ini menunjukkan bahwa tingginya permintaan produk industri kehutanan ke negara tersebut berupa pulp. Selain Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Korea masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar



Nilai ekspor produk industri kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk melihat kinerja ekspor. Nilai ekspor ini untuk ekspor produk industri kehutanan menjadi sangat penting karena bisa saja 1 jenis produk yang sama beratnya tapi jenis/species kayunya atau nilai artistik lebih tinggi maka kedua produk tersebut nilai ekspornya akan berbeda. Untuk ekspor produk industri kehutanan pada umumnya nilai ekspornya semakin meningkat untuk produk semakin hilir, end-use atau bernilai seni tinggi.

Satuan yang digunakan yaitu US dollar yang berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Berdasarkan data dari SILK tanggal 31

Desember 2022 yang diunduh pada 10 Januari 2023 pukul 7.34 WIB, data dan informasi terkait ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa dibandingkan tahun 2021, volume ekspor tahun 2022 mengalami penurunan 7.35 % sedangkan nilai ekspor mengalami kenaikan 4,45%. Hal ini diduga karena jenis produk yang di ekspor memiliki berat/volume yang kecil namun, memiliki nilai yang tinggi.

Kenaikan nilai ekspor juga tidak sejalan dengan produksi kayu bulat dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak hanya berasal dari kayu bulat tetapi juga dari industry lanjutan, serta bahan baku juga berasal dari impor.

No.	URAIAN	SATUAN	2021	2022
1	Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	Dokumen	240.366	222.546
2	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	Negara	190	185
3	Jumlah Negara Tujuan Ekspor Anggota Uni Eropa	Negara	28	27
4	Jumlah pos tarif (Kode HS - 4 digit)	HS	45	47
5	Jumlah Pelabuhan Asal/Muat (Seluruh Indonesia)	-	66	69
6	Jumlah pelabuhan bongkar (seluruh negara tujuan ekspor)	-	2.162	2.240
7	Berat Bersih	Kg	17.036.598.596	15.783.516.287
8	Nilai	US\$	13.608.242.262	14.214.365.921

Strategi yang ditempuh untuk mencapai IKK ini terutama di Tahun 2022 melalui :

1. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku recycle untuk kertas ekspor);
2. Sosialisasi/Workshop dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Revisi peraturan terkait ekspor dan impor, berpartisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal dll.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai IKK antara lain :

1. Demand permintaan ekspor produk-produk olahan hasil hutan menurun pada tahun 2022.
2. Sebagian negara tujuan ekspor menghentikan ekspor ke Cina (adanya *lockdown*), serta negara-negara Eropa dan Amerika sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina.
3. Adanya persoalan di negara tujuan ekspor menyebabkan menumpuknya stock di gudang industri dalam negeri.

4. Buyer membatalkan impornya sehingga timbul renegotiasi kontrak.
5. Kelangkaan angkutan/kapal yang menyebabkan nilai transportasi tinggi yang berakibat banyaknya stock.

Upaya tindak lanjut :

1. Perlunya upaya-upaya untuk kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal.
2. Meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya.
3. Perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/ kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Ekspor Produksi Kayu Olahan, pelaksanaan indikator ini didukung oleh 1 (satu) Rincian Output (RO) dengan uraian target dan realisasi capaian sebagaimana tabel berikut.

Dukungan Rincian Output pada IKK 2

Kode Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persen (%)
6733.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	Badan Usaha	250	315	126
Jumlah			250	315	126

IKK 03.

UMKM YANG DIFASILITASI SVLK



Indikator Kinerja Kegiatan UMKM yang difasilitasi SVLK merupakan salah satu program Kegiatan Prioritas Nasional.

Lingkup pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

Kegiatan fasilitasi SVLK berupa sertifikasi baru dan penilikan hanya diberikan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah dalam bentuk kelompok atau perorangan.

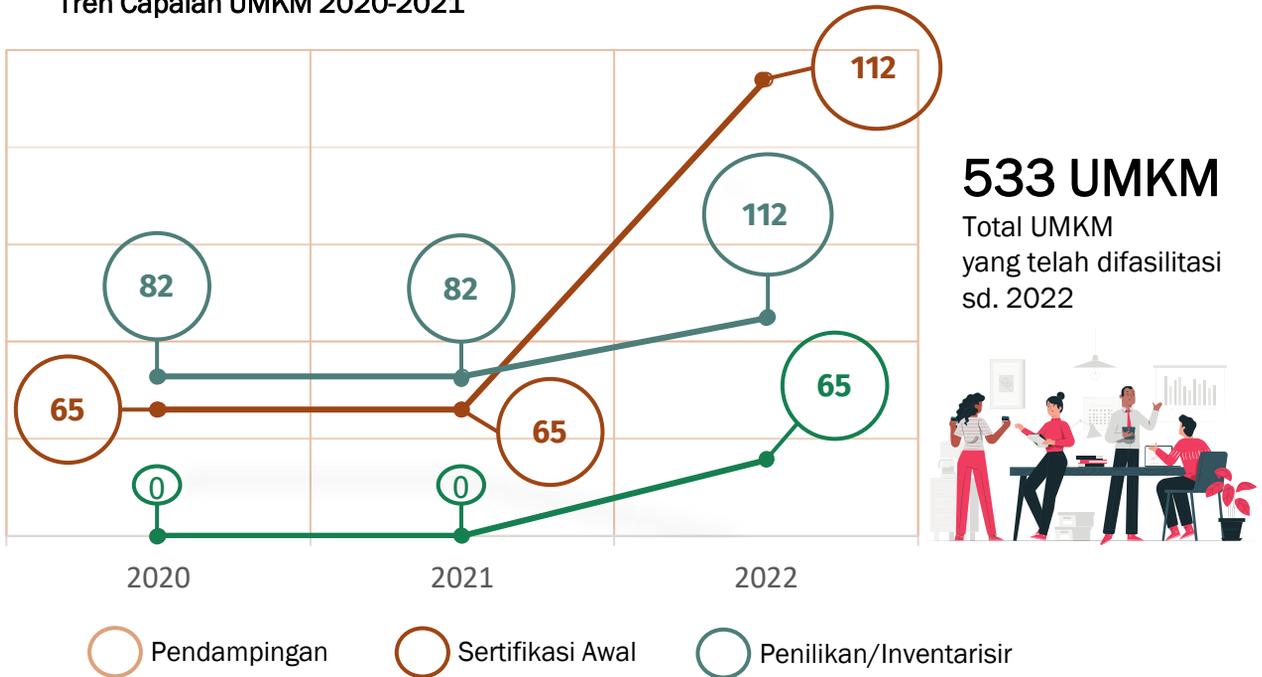
Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang difasilitasi SVLK (sertifikasi awal/penilikan /inventaris sebanyak 194 UMKM, atau 129,33% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut terdiri dari 90 UMKM dipusat dan 104 UMKM yang tersebar di wilayah Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian IKK tahun ini melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 710 UMKM, maka capaian UMKM yang telah difasilitasi secara kumulatif tahun 2020-2022 telah mencapai 75,07% dari target.

Capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021, namun hal ini masih relevan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021.

Tren Capaian UMKM 2020-2021



Pada tahun 2022, Ditjen PHL memfasilitasi SVLK bagi UMKM sebanyak 194 UMKM yang terdiri dari fasilitasi sertifikasi awal/penilikan oleh Direktorat BPPHH sebanyak 90 UMKM (Hutan Hak dan IKM) serta fasilitasi penilikan/inventarisir oleh BPHL sebanyak 104 UMKM. Rincian Kegiatan fasilitasi sertifikasi awal/penilikan/inventarisir tahun 2020-2022, dapat dilihat pada ilustrasi di atas.

Kegiatan Sertifikasi Awal merupakan kegiatan audit awal oleh LPVI terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Sedangkan Kegiatan Penilikan atau *surveillance* merupakan kegiatan yang dilakukan LPVI untuk memastikan Auditee masih menerapkan sistem manajemen mutu, standar dan pedoman SVLK.

Untuk mendapatkan capaian tersebut, dilakukan beberapa langkah seperti koordinasi berbagai pihak yang lebih intensif, kegiatan sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas, serta kegiatan pendampingan bagi sertifikasi awal

Pelaksanaan Kegiatan sertifikasi dan penilikan sebagian masih mengalami hambatan sebagaimana tahun sebelumnya karena pandemic COVID-19, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penjadwalan ulang penilikan atau melakukan penilikan secara *remote audit*.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 UMKM yang difasilitasi Sertifikat Penilaian SVLK, pelaksanaan indikator ini didukung oleh 1 (satu) Rincian Output (RO) dengan uraian target dan realisasi sebagaimana table 4

berikut. capaian kegiatan Rincian Output tersebut merupakan capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL).

Kode Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persen (%)
6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	UMKM	50	90	55,56
Jumlah			50	90	55,56

Kendala Fasilitasi SVLK bagi UMKM :

1. Pemahaman UMKM terhadap SVLK masih minim, sehingga belum mengerti maksud dan tujuan akan dilaksanakannya sertifikasi;
2. Belum ada perbedaan manfaat yang signifikan terhadap UMKM yang telah ber S-LK dan belum ber S-LK sehingga beberapa UMKM yang sudah berS-LK tidak bersedia dilakukan penilikan.

Upaya Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi yang intensif ke Pemda dan pelaku Usaha terkait implementasi SVLK;
2. Koordinasi dengan LKPP dan akan ditindaklanjuti dengan memberikan insentif bagi UMKM berupa usulan daftar UMKM yang ber S-LK dalam e-katalog serta pembelian produk UMKM berS-LK untuk promosi



Produk Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu UMKM



B.

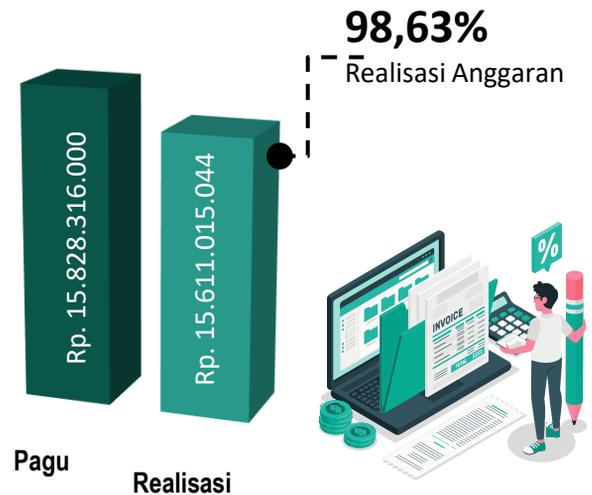
REALISASI ANGGARAN



REALISASI ANGGARAN DIT. BPPHH TAHUN 2022

Direktorat BPPHH Tahun 2022 bertanggung jawab pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.828.316.000, yang terdiri dari 6 (enam) output kegiatan.

Realisasi anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan, Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hutan Lestari tahun 2022 sebesar 15.611.015.044 atau 98,63 % dari pagu sebagaimana dirinci pada Tabel dibawah.



Realisasi anggaran berdasarkan rincian output

Kode Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Persen (%)
6733.AFA.001	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	226.852.000	223.859.309	98,68
6733.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	5.323.517.000	5.301.080.299	99,58
6733.PBV.001	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	422.965.000	401.577.500	94,94
6733.QAH.001	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	570.840.000	569.451.657	99,76
6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	7.833.816.000	7.669.366.900	97,90
6733.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1.450.326.000	1.445.679.379	99,68
Jumlah		15.828.316.000	15.611.015.044	98,63

C.

PERHITUNGAN EFISIENSI



PERHITUNGAN EFISIENSI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Hasil pengukuran kinerja tersebut, semua target kinerja dalam IKK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022 pada awalnya sebesar Rp 19.600.953.000 dan

pagu akhir (setelah revisi) sebesar Rp 15.828.316.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.611.015.044 (98,63%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,34%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,91 (dari perhitungan rasio input dibagi output = 98,63 : 108,34 = 0,91). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2022 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 4.



PERHITUNGAN EFISIENSI

$$\frac{\%realisasi\ anggaran\ (input)}{\%capaian\ output\ (output)} = \frac{98,63\%}{108,34\%} = 0,91$$

“Efisien”



D CAPAIAN KEGIATAN LAINNYA



CAPAIAN KEGIATAN LAINNYA

1. Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi produksi kayu olahan sesuai kapasitas izin yang diberikan dan bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan PBPHH pada peraturan perundang undangan serta peningkatan kinerja Pengolahan Hasil Hutan.

Direktorat BPPHH telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH. Berdasarkan hasil penapisan awal evaluasi kinerja PBPHH berdasarkan data administrasi, telah dilakukan klasifikasi kinerja PBPHH ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut sebanyak 165 unit PBPHH;
2. Melakukan kegiatan produksi < 50 persen sebanyak 242 unit PBPHH;
3. Melakukan kegiatan produksi > 50 persen sebanyak 101 unit PBPHH.

Terhadap PBPHH yang masuk klasifikasi terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 tahun berturut-turut telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh BPHP dan Dinas pada Tahun 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Dirjen PHL sebagai bahan tindak lanjut. Pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian PBPHH, saat ini telah terbit 108 pencabutan PBPHH. Hal tersebut sebagai upaya menertibkan pemegang PBPHH dalam melaksanakan kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan peraturan



perundang-undangan, upaya rasionalisasi kapasitas terpasang sesuai PBPHH dengan realisasi produksi dan ketersediaan bahan baku akan terus dilakukan telah dilaksanakan.

Terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 50% telah dilakukan bedah kinerja yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP dan Asosiasi. Pada Tahun 2022 bedah kinerja telah dilaksanakan terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 50% yang dilaksanakan yaitu di Semarang sebanyak 12 PBPHH untuk PBPHH yang berada di Jawa Tengah, di Malang sebanyak 8 PBPHH untuk PBPHH yang berada di Provinsi Jawa Timur, di Bogor sebanyak 4 PBPHH untuk PBPHH di Provinsi Kalimantan Timur, di Jayapura sebanyak 11 PBPHH untuk PBPHH di Provinsi Papua dan di Sorong sebanyak 12 PBPHH untuk PBPHH di Provinsi Papua Barat. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Tim Direktorat PPHH sebanyak 42 PBPHH.

2. Sosialisasi UMKM Bersama Anggota DPR

Pada tahun 2022, Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan melaksanakan kegiatan Sosialisasi SVLK Bagi UMKM dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR-RI.

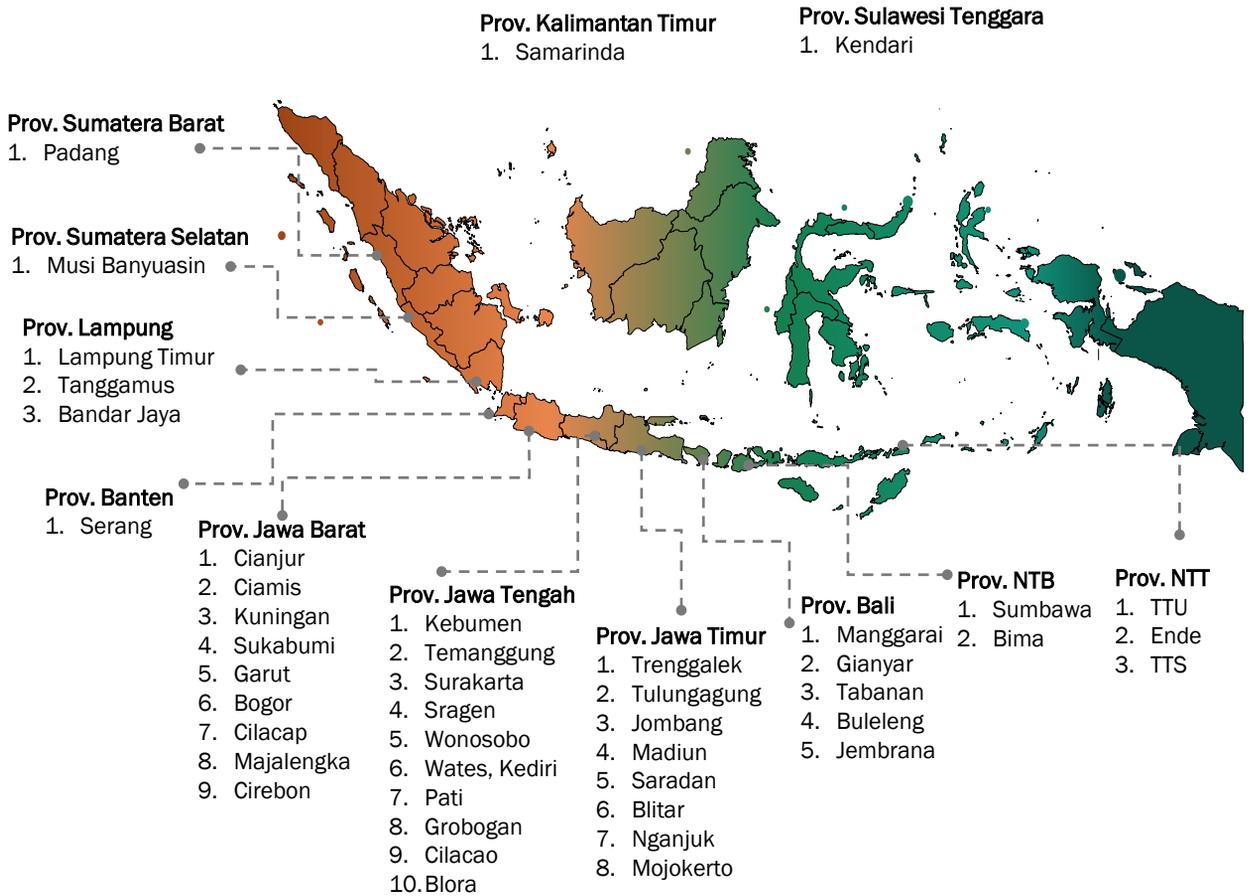
Kegiatan tersebut bertujuan agar meningkatkan pemahaman SVLK terutama pada tingkat UMKM dan sekaligus menyampaikan kegiatan fasilitasi/ pembiayaan SVLK dan penerbitan dokumen ekspor bagi UMKM.

Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya daya saing UMKM terutama untuk pemasaran ekspor sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan. Tercatat sosialisasi yang melibatkan anggota DPR terlaksana sebanyak..... Kali yang tersebar di 12 Provinsi.



04 F
Mapipi, Papua | 2022.11.02 09:34

Lokasi Sosialisasi SVLK bagi UMKM Bersama Anggota Komisi IV DPR RI



3. Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan

Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Tahun 2023 mengambil lokus di Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah pengolah kayu terbesar untuk ragam produk kayu lapis, veneer dan kayu gergajian dengan pasokan bahan baku berasal dari hutan alam, hutan tanaman (HTI maupun Perum Perhutani), hutan rakyat maupun impor.

Secara umum di Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan industri pengolahan kayu yaitu :

- a. jalur transportasi keluar masuk kayu bulat dan hasil produksi yang lancar mulai dari jalan desa sampai jalan tol, Pelabuhan muat bongkar yang memadai,
- b. kemudahan dalam perizinan berusaha didukung oleh regulasi baik dari pusat maupun daerah dan
- c. luas hutan produksi yang masih mencukupi pasokan bahan baku terlihat dari jumlah pasokan bahan baku sebegini besar dipasok dari hutan rakyat
- d. serta jumlah tenaga kerja yang bisa diserap masih banyak dengan upah minimum yang terjangkau oleh pengusaha

Berdasarkan hasil kajian terhadap pengembangan pasar dan rantai pasok industri pengolahan kayu di Provinsi Jawa Timur, secara umum direkomendasikan capaian yang terjadi di Jawa Timur untuk bisa diterapkan di provinsi lainnya. Selain itu

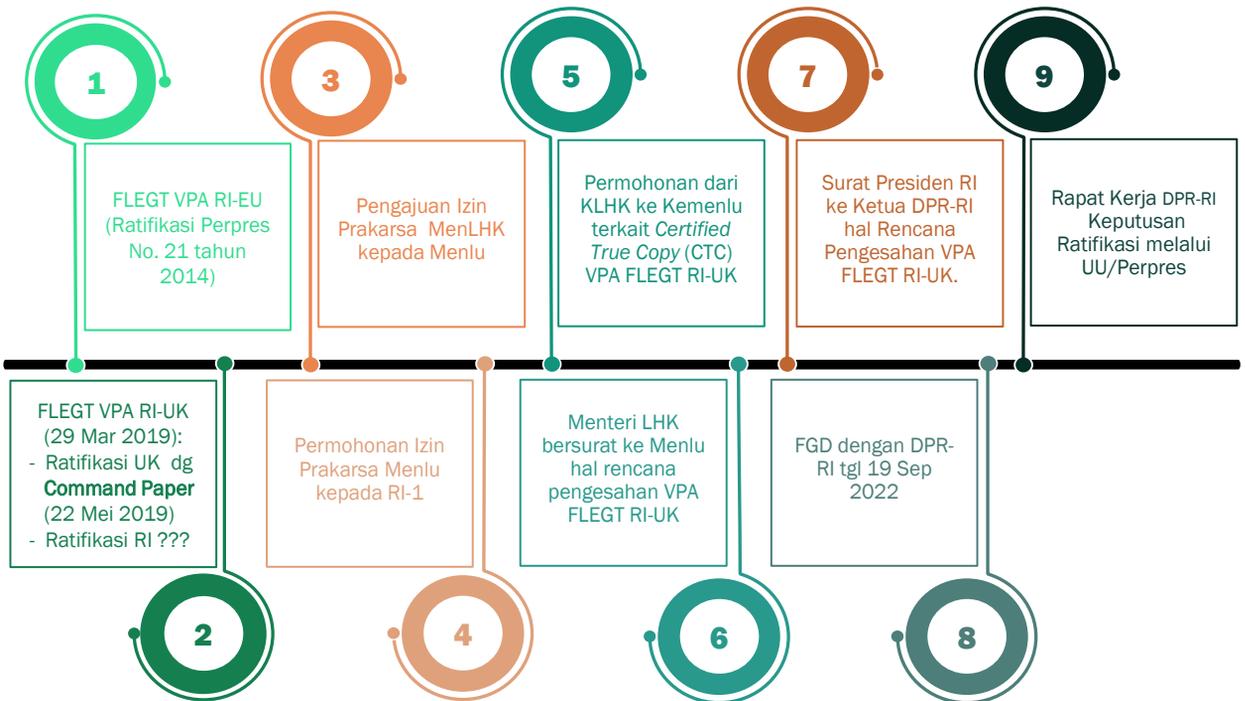
juga disampaikan usulan dan rekomendasi khususnya usaha kecil mikro (UMK dengan kapasitas < 2.000 m³/tahun) sebagai berikut :

- a. Perlunya penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan bahan baku kayu sehingga bisa berdaya saing dalam produk hasil olahannya, pengerjaan efisien dan tepat waktu, rendemen lebih tinggi karena hanya mengandalkan jenis produknya sesuai pesanan.
- b. Untuk penguatan pemasaran produk kayu olahan, perlu didorong pemanfaatan E-commerce untuk perdagangan produk kayu olahan baik lokal maupun ekspor
- c. Mendorong usaha kecil mikro untuk menjalin kerjasama/kemitraan dengan usaha menengah atau usaha besar dalam kegiatan usaha baik itu pasokan bahan baku, proses produksi maupun pemasaran hasil kayu olahan.
- d. Memberikan kemudahan dalam pinjaman/bantuan modal usaha baik dari Lembaga perbankan maupun dari instansi terkait.
- e. Perlunya dilakukan penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan teknologi tepat guna serta bimbingan dan pengawasan agar usahanya cepat maju dan berkesinambungan.

4. Capaian Ratifikasi FLEGT-VPA Indonesia – Inggris Raya (UK)

Tujuan ratifikasi adalah untuk memberikan kemudahan ekspor produk kayu ke Inggris Raya melalui pemberlakuan jalur hijau ekspor kayu FLEGT sehingga harapannya

terjadi peningkatan nilai dan akses pasar Ekspor Produk Kayu Indonesia pada dunia internasional



Keberhasilan Diplomasi RI-UK untuk melakukan ratifikasi FLEGT-VPA IND-UK yang disetujui Komisi VI DPR RI melalui mekanisme PERPRES



BAB IV PENUTUP





PENUTUP

Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Capaian volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 47,87 juta m³, atau 106,38% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebanyak 45 juta m³.
- b. Capaian Volume ekspor produk olahan hasil hutan sebanyak 15,78 juta ton atau 98,63 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebanyak 16 juta ton.
- c. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK sebanyak 194 UMKM, atau 120% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebanyak 150 Kelompok UMKM.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan IKK, dapat tercapai dengan baik dan terdapat capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Pagu anggaran akhir

kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022 sebesar Rp 15.828.316.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.611.015.044 (98,63%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,34%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,91.

Melihat hasil pencapaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2022, maka untuk peningkatan kinerja kegiatan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Mencermati tren perubahan capaian output seiring dengan dinamisnya permintaan pasar terhadap produk hasil hutan dan perlunya pengembangan *intelligence marker*.
2. Meningkatkan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dan para pihak dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

